



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI NURHAYATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
3. NHK : 120751

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.587.911.000

1. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah Seluas 1470 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/69 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.472.911.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 604.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, HONDA CRV SUV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 313.899.338



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.520.310.338
III. HUTANG	Rp.	569.848.065
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.950.462.273

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.